

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu yang diunggulkan dalam kehidupan ekonomi di semua negara di dunia. Para ekonom dan politisi dari semua negara, baik itu negara kaya maupun miskin yang menganut sistem kapitalis, sosialis maupun campuran, semuanya menargetkan dan menomersatukan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pertumbuhan ekonomi sendiri sudah diyakini sebagai salah satu indikator dari keberhasilan proses pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi oleh Simon Kuznet diartikan sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Dalam bukunya *Modern Economic Growth*, Simon Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai “suatu kenaikan terus menerus dalam produk perkapita atau per pekerja, seringkali diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk dan biasanya dengan perubahan struktural”.

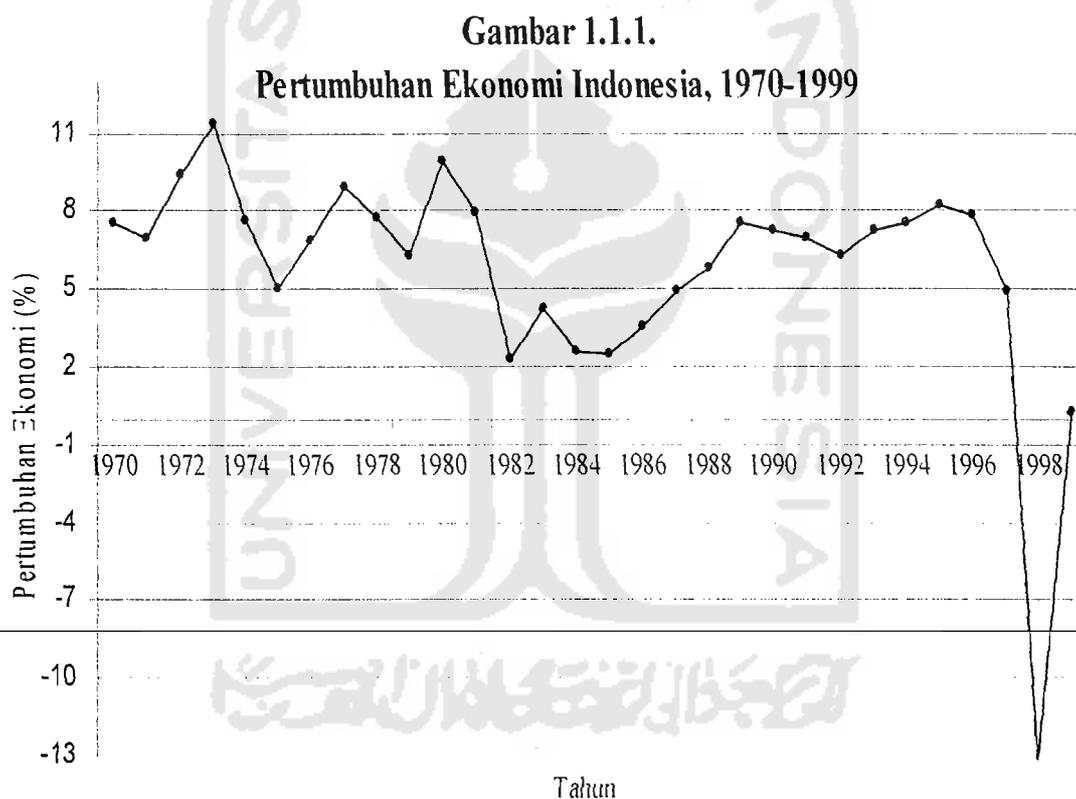
Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat mengesankan, hingga pertengahan 1997 banyak pihak memuji prestasi pembangunan ekonomi Indonesia. Bank Dunia menyatakan Indonesia bersama negara-negara timur

lainnya disebut sebagai High Performing Asian Economies (HPAEs) yang memiliki kinerja perekonomian ajaib, pertumbuhan ekonomi tinggi, inflasi rendah, terjadi transformasi struktural dalam perekonomian, pemerataan ekonomi membaik, dan oleh karenanya memungkinkan terjadinya suatu pembangunan yang berkelanjutan (Hamid dan Anto,2000:xii).

Pertumbuhan dan proses pembangunan ekonomi yang pesat tersebut setidaknya dapat dilihat dari tercapainya pertumbuhan dua digit untuk pertama kalinya pada tahun 1968 setelah kekacauan yang terjadi pada paruh pertama dekade 1960an. Sejak saat itu, pertumbuhan ekonomi yang cepat, sedikitnya 5 persen pertahun dan tetap dipertahankan hingga tahun 1982, yaitu ketika turunya harga minyak bumi di dunia menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun drastis. Pertumbuhan yang lambat ini terus berlangsung hingga tahun 1986 (kecuali pada tahun 1984, karena banyaknya investasi minyak bumi dan gas dalam jumlah besar, menaikkan pertumbuhan industri hingga 10 persen), ketika perubahan kebijakan yang diterapkan pada pertengahan dekade 1980an mulai terlihat hasilnya. Di akhir dekade tersebut, perekonomian Indonesia telah pulih kembali dan tingkat pertumbuhan sebesar 6-7 persen kembali berhasil dicapai, tidak terlalu jauh bedanya dibanding pertumbuhan yang tinggi pada periode kejayaan minyak bumi (Hill,2001:17). Sampai dengan tahun 1996 pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tercatat diatas 7 persen, bahkan pada tahun 1995 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai angka 8,2 persen. Pada tahun 1997 ketika terjadi krisis moneter yang berdampak luas terhadap kinerja perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi memperlihatkan trend yang menurun. Tercatat

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1997 sebesar 4,7 persen, tahun 1998, saat dimana krisis mata uang dan ekonomi memuncak pertumbuhan ekonomi turun drastis hingga minus 13,2 persen dan pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi tercatat naik pada angka 0.2 persen.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama kurun waktu tahun 1970 sampai dengan tahun 1999 dapat dilihat pada Gambar 1.1.1 berikut ini:



Sumber: Statistik Indonesia, Berbagi Edisi

Seperti diketahui bahwa dalam dunia perekonomian modern terdapat empat kelompok utama dari pelaku ekonomi yaitu pelaku rumah tangga, pelaku perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa, pelaku pemerintah/negara dan pelaku luar negeri. Dalam sebuah perekonomian negara sedang berkembang

(NSB) seperti Indonesia peran pemerintah dalam mempengaruhi kinerja perekonomian sangatlah besar hal ini dikarenakan salah satunya karena pemerintah bertindak sebagai pelopor dan pengendali pembangunan. (Suparmoko,1990:23)

Pertumbuhan ekonomi yang biasanya dijadikan salah satu ukuran perkembangan perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh banyak faktor yang salah satunya adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal melalui APBN yang tidak saja digunakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi namun juga dapat digunakan untuk mempengaruhi kinerja perekonomian nasional dalam proses pembangunan. Kebijakan fiskal melalui pengaturan tingkat pengeluaran pemerintah dapat merangsang atau menurunkan intensitas kinerja perekonomian nasional.

Secara umum pengeluaran pemerintah dapat dibagi dalam dua kategori pertama adalah pengeluaran pemerintah yang bersifat *exhaustive* yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa yang dapat dengan langsung dikonsumsi maupun untuk memproduksi barang yang lain. Pengeluaran ini bersifat memindahkan faktor-faktor produksi dari sektor swasta kepada sektor pemerintah misalkan pembelian terhadap bahan makanan, mesin-mesin atau pembelian barang-barang yang dihasilkan oleh pemerintah sendiri seperti gaji pegawai negeri, pengeluaran dalam bidang militer dll. Jenis pengeluaran pemerintah yang kedua adalah pengeluaran yang bersifat *transfer* yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan

sosial seperti misalnya Jaring Pengaman Sosial (JPS), pemindahan uang kepada perusahaan-perusahaan sebagai subsidi ataupun sebagai digunakan sebagai *grants* atau hadiah kepada negara-negara lain.

Dalam kasus Indonesia pengeluaran pemerintah yang meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan sebenarnya diarahkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan, serta pengalokasian pengeluaran pembangunan sesuai prioritas yang telah ditetapkan. Pengeluaran rutin sendiri diprioritaskan untuk pembiayaan aparatur pemerintah serta pembiayaan operasional dan pemeliharaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memelihara aset-aset negara dan hasil pembangunan serta mendukung kelangsungan dan kelancaran jalannya roda pemerintahan (Usman, 1997:33)

Pengeluaran pemerintah sendiri sering menjadi topik kontroversi dalam pengaturan keuangan negara. Jika diamati lebih jauh ternyata tingkat pengeluaran pemerintah Indonesia dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang cukup besar, hal ini dapat dilihat dari semakin besarnya pengeluaran pemerintah terhadap proporsi pendapatan nasional dan hal ini setidaknya mengindikasikan bahwa semakin besarnya kegiatan pemerintah dalam perekonomian, dari Tabel 1.1.2 dapat dilihat persentase pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional di Indonesia selama kurun waktu tahun 1970 sampai dengan 1999 .

Tabel 1.1.2
Peranan Masing-Masing Jenis Penggunaan Produk Domestik
Bruto,1970-1999
(Persentase)

Tahun	Jenis Penggunaan (Atas Harga Berlaku)				
	Konsumsi RT	Konsumsi Pemerintah	Pembentukan Modal Domestik Bruto	Ekspor Netto	PDB
1970	79.6	9	14	-2.6	100
1971	77.6	9.3	15.8	-2.7	100
1972	72.5	9.1	18.8	-0.4	100
1973	71.1	10.6	17.9	0.4	100
1974	68.6	7.8	16.8	6.8	100
1975	69.1	9.9	20.3	0.7	100
1976	68.4	10.3	20.7	0.6	100
1977	65.6	10.9	20.1	3.4	100
1978	66.8	11.7	20.5	1	100
1979	60.9	11.6	21	6.5	100
1980	60.5	10.3	20.9	8.3	100
1981	65.8	10.7	21.4	2.1	100
1982	69.9	11.4	22.6	-3.9	100
1983	60.71	11	25.7	2.59	100
1984	58.38	10.5	22.5	8.62	100
1985	55.76	11.5	20.7	12.04	100
1986	61.7	11.1	24.2	3	100
1987	57.68	9.4	24.8	8.12	100
1988	57.07	9	25.9	8.03	100
1989	53.36	9.4	27.3	9.94	100
1990	54.35	9.1	28.4	8.15	100
1991	52.43	9.1	28.1	10.37	100
1992	52.28	9.5	27.3	10.92	100
1993	54.97	9.9	25.9	9.23	100
1994	57.44	8.1	27.6	6.86	100
1995	61.58	7.8	28.4	2.22	100
1996	62.25	7.6	29.6	0.55	100
1997	61.68	6.8	4.7	26.82	100
1998	67.78	5.7	13.1	13.42	100
1999	73.26	6.5	0.82	19.39	100

Sumber : Statistik Indonesia, Berbagai Edisi.

Sering kali juga dengan semakin berkembangnya peranan pemerintah justru akan mengakibatkan *inefisiensi*, pemborosan dan birokrasi (Todaro,1998:221). Ditambah lagi dengan adanya ekspansi pengeluaran pemerintah akan dibutuhkan tambahan pendapatan atau penerimaan baru, yang salah satu sumber terbesarnya berasal dari pajak hal ini berarti akan meningkatkan tarif maupun menambah wajib pajak. Seperti juga sudah diketahui bahwa penerimaan dalam negeri dalam

APBN tidak mampu menutupi pos-pos pengeluaran pemerintah, hal ini akan mengakibatkan defisit anggaran yang kemudian ditutup dengan bantuan luar negeri yang tidak saja menambah beban dalam APBN melainkan juga semakin mengurangi kemandirian dalam pembiayaan pembangunan .

1.2. Rumusan Masalah

Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian suatu negara. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat didalam identitas pendapatan nasional yang berbanding lurus yang berarti bila pengeluaran pemerintah bertambah maka pendapatan nasional juga akan bertambah (Dumairy,1997:161). Disamping itu kebijakan ekspansif fiskal dengan menambah pengeluaran pemerintah dengan tidak diimbangi dengan penerimaan dapat menyebabkan defisit anggaran dan menimbulkan instabilitas dalam kegiatan perekonomian nasional misalkan terjadi *crowding out*, dimana ekspansi fiskal menyebabkan naiknya suku bunga dan dengan demikian mengurangi pengeluaran swasta, terutama investasi (Dornbusch dan Fisher,1992:141). Sementara itu dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara -yang dapat dilihat dari perkembangan output nasionalnya- akan mengakibatkan peran pemerintah yang semakin besar yang berarti juga bertambahnya pengeluaran pemerintah.

Masalah yang timbul dari judul dan latar belakang yang telah dikemukakan diatas adalah bagaimana hubungan yang sesungguhnya terjadi antara pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) dengan pertumbuhan ekonomi, apakah

pengeluaran pemerintah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau apakah pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah, atau pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi saling mempengaruhi.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan pembahasan selanjutnya tidak terlepas dari topik yang dipilih, maka dalam penelitian ini batasan ruang lingkungannya adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang dipilih dalam penelitian ini adalah variabel pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah di Indonesia.
2. Pertumbuhan ekonomi dijelaskan oleh variabel Produk Domestik Bruto (PDB) Riil Indonesia (dalam Milliar Rupiah).
3. Variabel Pengeluaran Pemerintah dijelaskan oleh Pengeluaran Pemerintah Indonesia (dalam Milliar Rupiah).
4. Kurun waktu atau periode penelitian ini adalah dari tahun 1973-1997.

1.4. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan latar belakang masalah, perumusan masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisa bagaimana hubungan yang terjadi antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.

2. Untuk mengetahui variabel mana yang memiliki pengaruh yang kuat atas variabel yang lainnya.

1.5. Manfaat Penelitian.

Dari Tujuan yang ingin dicapai diatas, penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Ekonomi Strata Satu pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan khasanah kepustakaan di bidang penelitian sejenis.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan maupun tambahan informasi bagi pembuat kebijakan pemerintah maupun penelitian-penelitian lain.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia atas dasar harga konstan tahun 1983 dalam satuan Miliar Rupiah, yang didapat dari Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, berbagai edisi dan Statistik Indonesia yang masing-masing diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS),

yaitu mencakup data sekunder dalam bentuk runtut waktu (*time-series*) antara periode 1973-1997.

1.6.2. Uji Akar Unit dan Kointegrasi

Perkembangan aplikasi ekonometri yang sudah sedemikian maju, menciptakan pendekatan kointegrasi (*cointegration approach*) dan model koreksi kesalahan (*Error Correction Model=ECM*) yang merupakan pemecahan yang potensial untuk menghindari regresi lancung (*spurious regression*) yang timbul dalam data runtut waktu (*times series data*) yang dipergunakan. (Saleh & Hidayat, 2000:128)

Prosedur estimasi model koreksi kesalahan (*Error Correction Model=ECM*) dimulai dengan menguji akar-akar unit (*unit root test*) dan tingkat atau derajat integrasi kemudian dilanjutkan dengan pengujian kointegrasi variabel-variabel yang digunakan. Pengujian ini diperlukan untuk melihat apakah data yang digunakan stasioner (*non stochastic*) atau tidak stasioner (yang berarti mempunyai akar unit atau mempunyai *stochastic trend*). Secara statistik, sebuah data runtut waktu dikatakan stasioner jika rata-rata, varian dan kovarian dari variabel-variabel tersebut seluruhnya tidak di pengaruhi oleh waktu.

Estimasi yang menggunakan data yang tidak stasioner akan menyebabkan timbulnya super konsistensi, menghasilkan nilai yang tidak tepat sehingga inferensi juga tidak tepat. Oleh karena itu, sangat ditekankan untuk menguji akar-akar unit pertama kali dan kemudian langsung

dilanjutkan dengan menguji kointegrasi sebelum dilakukan estimasi (Pasaribu & Saleh, 2001:22 ; Insukindro, 1991:6-12).

Untuk menguji akar-akar unit dapat dilakukan dengan tipe Dickey Fuller (DF), caranya adalah dengan menaksir model otoregresif berikut ini dengan OLS:

$$\Delta Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 Y_t + \sum_{j=1}^{\rho} \gamma_j \Delta Y_{t-1} + e_t$$

dimana:

- Y = Variabel yang diamati
- ρ = Jumlah lag variabel dependen
- e = Error Term

Formulasi diatas digunakan untuk menguji hipotesa berikut ini:

H_0 : Non Stasioner

H_a : Stasioner

Setelah dilakukan uji terhadap akar-akar unit, dan setelah diketahui pada derajat integrasi berapa variabel yang diamati telah stasioner (apabila data tidak stasioner pada tingkat level), langkah selanjutnya adalah menguji kointegrasi antar variabel. Untuk melakukan uji kointegrasi, data yang digunakan harus berintegrasi pada derajat yang sama. Jika dua atau lebih variabel yang digunakan mempunyai derajat integrasi yang berbeda, misalnya $G \sim 1(1)$ dan $Y \sim 1(2)$, maka kedua variabel tersebut tidak dapat berkointegrasi. Sedangkan untuk uji kointegrasi dapat dihitung dari formulasi yang mengadopsi pengujian akar-akar unit dari Dickey dan Fuller yang dapat ditulis sebagai berikut :

$$\Delta U_t = \beta_0 + \beta_1 U_t + \sum_{j=1}^{\rho} \gamma_j \Delta U_{t-1} + e_t$$

dimana:

U = Residual dari persamaan struktural kointegrasi

ρ = Jumlah lag variabel dependen

e = Error Term

Hipotesa yang diuji adalah :

H₀ = Non Kointegrasi

H_a = Kointegrasi

Keputusan untuk menolak H₀ untuk uji akar-akar dan kointegrasi adalah jika nilai t-statistik DF dari α_1 dan β_1 lebih besar dari t-tabel McKinnon.

1.6.3. Spesifikasi Model Dasar.

Selanjutnya, spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang dianggap dapat menunjukkan hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Ln}Y_t = a_0 + a_1 \text{Ln}G_t + U_t \quad (1)$$

$$\text{Ln}G_t = b_0 + b_1 \text{Ln}Y_t + E_t \quad (2)$$

dimana:

$\text{Ln}Y_t$	=	Log dari Produk Domestik Bruto (PDB)
$\text{Ln}G_t$	=	Log dari Pengeluaran Pemerintah
a_0, b_0	=	Konstanta
a_1, b_1	=	Koefisien regresi
Ut dan Et	=	Error term yang diharapkan tidak saling berkorelasi

1.6.4. Alat Analisis

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif terhadap data tahunan (*time series data*) dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1997. Analisis ini berdasarkan metode penelitian dengan pengujian terhadap data sekunder. Analisis deskriptif kuantitatif menggunakan ekonometrik sebagai alat bantu untuk mendapatkan gambaran hubungan antara variabel-variabel yang digunakan dalam model. Dalam pengolahan data penulis menggunakan piranti lunak komputer sebagai alat bantu yaitu program aplikasi komputer *Micro Time Series Program* (TSP) versi 7.00 dan program aplikasi komputer *EViews* versi 3.0.

Alat analisis yang digunakan untuk melihat hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi (dihitung dari perubahan Produk Domestik Bruto/PDB) dan pengeluaran pemerintah di Indonesia adalah Uji Kausalitas model koreksi kesalahan (*Error Correction Model=ECM*). Adapun alasan digunakannya model koreksi kesalahan (ECM) adalah :

1. Mekanisme koreksi kesalahan memiliki keunggulan baik dari segi nilainya dalam menghasilkan persamaan yang diestimasi dengan properti statistik yang diinginkan maupun dari segi kemudahan persamaan tersebut untuk diinterpretasikan (Insukindro, 1992:14)

2. Model koreksi kesalahan memecahkan masalah variabel runtut waktu yang tidak stasioner dan regresi lancung atau korelasi lancung dalam analisis ekonometrika melalui penggunaan variabel perbedaan yang tepat di dalam model, namun tanpa menghilangkan informasi jangka panjang yang diakibatkan penggunaan data perbedaan semata (Insukindro,1998:2 ; Astuti,2001:15).

3. Model ECM yang valid mengindikasikan adanya kointegrasi (hubungan jangka panjang) antar variabel, spesifikasi modelnya benar, teorinya benar, dan terdapat hubungan kausalitas paling tidak hubungan satu arah di mana variabel *independen* mempengaruhi variabel *dependen* secara signifikan-(Astuti,2001:15).

Untuk dapat menerapkan uji kausalitas model koreksi kesalahan dalam kasus hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengeluaran pemerintah spesifikasi model koreksi kesalahan yang akan digunakan dapat diturunkan dari fungsi biaya kuadrat tunggal (Single Period Quadratic Cost Function) .Selanjutnya mengikuti pendekatan yang dikembangkan oleh Domowitz dan Elbadawi dengan terlebih dahulu melakukan minimisasi terhadap fungsi biaya kuadrat tunggal, akan diperoleh bentuk baku model koreksi kesalahan (Insukindro,1999:3-6) sebagai berikut:

$$DLnY_t = \alpha + \gamma_1 DLnG_t + \gamma_2 LnG_{t-1} + \gamma_3 ECT1 + U_t \quad (3)$$

$$DLnG_t = \beta + \Psi_1 DLnY_t + \Psi_2 LnY_{t-1} + \Psi_3 ECT2 + E_t \quad (4)$$

dimana :

$$DLnY_t = LnY_t - LnY_{t-1}$$

$$DLnG_t = LnG_t - LnG_{t-1}$$

$$ECT1 = LnG_{t-1} - LnY_{t-1}$$

$$ECT2 = LnY_{t-1} - LnG_{t-1}$$

(t-1) = Kelambanan waktu satu tahun sebelumnya(lag)

α, β = Koefisien Regresi

γ_1, Ψ_1 = Koefisien jangka pendek persamaan (3) dan (4)

γ_2, Ψ_2 = Koefisien jangka panjang persamaan (3) dan (4)

γ_3, Ψ_3 = Koefisien ECT(*Error Correction Term*) persamaan (3) dan (4)

U_t, E_t = Error term yang diharapkan tidak saling berkorelasi

Adapun alasan digunakannya model diatas karena selain persamaannya dapat diestimasi secara langsung dengan OLS dengan parameter yang konsisten juga dari model baku ECM tersebut koefisien-koefisien jangka pendek dan jangka panjang dapat dengan mudah diperoleh.

1.6.5. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana ada hubungan antara residual dengan variabel bebas pada hasil regresi, sehingga varian residual tidak konstan. Akibatnya penaksir OLS tetap tidak bias tetapi tidak efisien. Adapun sebab terjadinya Heteroskedastisitas diantaranya adalah:

1. Kesalahan pengambilan sampel.

2. Kesalahan bentuk fungsi.
3. Variabel tidak lengkap.
4. Kesalahan definisi variabel.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melakukan uji Glejser

Uji Glejser dilakukan dalam tiga tahap (Gujarati, 1999:187) yaitu:

1. Melakukan regresi dengan variabel dependen terhadap variabel independen untuk mendapatkan nilai residual yang merupakan taksiran bagi faktor-faktor pengganggu.
2. Nilai residual kemudian diabsolutkan dari e_i menjadi $|e_i|$. Langkah selanjutnya adalah meregresikan nilai absolut residual dengan variabel-variabel independen untuk mendapatkan t-statistik pada masing-masing variabel independennya.
3. Membandingkan nilai t-statistik masing-masing variabel dengan t-tabel, jika nilai t-statistik $>$ nilai t-tabel maka terdapat heteroskedastisitas dan sebaliknya jika t-statistik $<$ t-tabel maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

2. Uji Autokorelasi

Istilah Autokorelasi menurut Maurice G. Kendall dan William R. Bucland adalah korelasi antara anggota seri observasi yang disusun menurut urutan waktu dan atau menurut tempat atau ruang (korelasi terhadap diri sendiri). Autokorelasi dapat pula berarti adanya hubungan

antar data dalam satu variabel atau hubungan antar residual dalam sebuah hasil regresi.

Adapun penyebab terjadinya Autokorelasi adalah :

1. Alamiah terjadi pada data times series.
2. Bentuk fungsi yang salah.
3. Kekurangan/hilangnya data.
4. Salah satu variabel bebas dalam model regresi merupakan nilai lag (lagged value) dari variabel terikat.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi pada model dapat dilihat dari nilai Durbin-Watson test sebagai berikut:

Jika $dw < dl$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika $dw > 4-dl$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Jika $du < dw < 4-du$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

dimana:

H_0 = Tidak ada autokorelasi baik positif atau negatif.

H_a = Ada autokorelasi baik positif atau negatif.

Keterangan :

dl = D-W tabel batas bawah

du = D-W tabel batas atas

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan, maka dalam penyusunannya penulis memberikan sistematika penulisan berdasarkan bab demi bab yang berurutan, berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang terbagi menjadi lima bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar terhadap masalah-masalah yang akan dibahas seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah ,tujuan penelitian ,manfaat penelitian,metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan bagian yang menjadi kajian pustaka dan landasan teori yang digunakan dalam memecahkan dan membahas masalah yang ada.

BAB III: GAMBARAN PERILAKU DATA

Bab ini merupakan deskripsi atau penjelasan secara garis besar atas subjek penelitian,deskripsi dilakukan dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data yang bersifat umum sebagai wacana pemahaman secara makro.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data-data yang digunakan dalam penelitian serta analisis dan pembahasan yang sesuai dengan judul berdasarkan metodologi penelitian pada Bab I .

BAB V: KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang diperoleh dari pemecahan masalah maupun dari hasil analisis data dan implikasi kebijakan untuk perbaikan dari hasil penelitian.